

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar

Diva Dwi Yuliani

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: divaaddy@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen berbasis sekolah, sekolah dasar, mutu pendidikan, strategi implementasi, strategi pendidikan

Keywords:

School-based management, elementary schools, education quality, implementation strategies, education strategies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah dasar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. MBS merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya secara mandiri, partisipatif, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber relevan seperti jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBS di sekolah dasar telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam hal kemandirian sekolah, profesionalisme guru, dan keterlibatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kapasitas manajerial kepala sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi komprehensif seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta pengembangan sistem evaluasi berkelanjutan. Dengan penerapan strategi tersebut, MBS dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan berdaya saing.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of School-Based Management (SBM) in primary schools as a strategy to improve educational quality. SBM represents a form of educational decentralization that grants greater authority to schools in managing resources independently, participatively, and accountably. The research method used is library research by reviewing various relevant sources such as scientific journals, theses, and previous studies. The findings indicate that the implementation of SBM in primary schools has had a positive impact on improving educational quality, particularly in terms of school autonomy, teacher professionalism, and community involvement. However, its implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, low community participation, and insufficient managerial capacity among school principals. To overcome these issues, comprehensive strategies are required, such as improving educators' competencies, strengthening community participation, ensuring financial transparency, and developing a continuous evaluation system. By applying these strategies, SBM can optimally contribute to achieving high-quality and competitive primary education.

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan proses pendidikan di jenjang dasar sangat menentukan kemampuan anak dalam menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam melanjutkan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pendidikan maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep MBS memberikan kewenangan lebih luas kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola lembaga sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di lingkungannya.

Secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang mentransfer otonomi pengelolaan kepada sekolah guna mendorong partisipasi kolaboratif antara komunitas internal sekolah (guru, siswa, dan staf) dengan eksternal (orang tua dan masyarakat). Otonomi dalam konteks ini memungkinkan sekolah untuk secara leluasa menentukan keputusan strategis yang relevan dengan kebutuhan spesifik, kapasitas institusi, serta tuntutan dari beragam pemangku kepentingan yang terlibat (Pratiwi, 2016).

Selain berfungsi sebagai bagian dari desentralisasi sistem pendidikan, implementasi MBS menuntut perubahan pola pikir tentang sekolah dan kapasitas para pemimpin pendidikan, terutama kepala sekolah dan guru dalam memimpin, mengelola, serta mengembangkan alternatif program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia, penerapan MBS telah menjadi bagian dari reformasi pendidikan yang didukung oleh undang-undang dan regulasi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah (Mulyasa, 2005).

Meski memiliki banyak manfaat, implementasi MBS di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta kendala infrastruktur dan pendanaan. Tantangan tersebut membutuhkan strategi penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan bagi tenaga pendidikan agar pelaksanaan MBS dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi MBS sangat bergantung pada kinerja kepala sekolah sebagai pemimpin dan penggerak utama, yang mampu mengelola sumber daya secara partisipatif dan transparan untuk mencapai peningkatan mutu Pendidikan (Wijoyo, 2021).

Tujuan utama dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan sekolah. Melalui sistem ini, sekolah diberi kebebasan dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, MBS diharapkan dapat menciptakan sekolah yang mandiri, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Dengan memahami tujuan dan tantangan tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi MBS dapat berjalan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.

Pembahasan

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pada hakikatnya, manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan penyesuaian berbagai sumber daya melalui serangkaian input tertentu demi tercapainya suatu tujuan atau terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Makna "berbasis" sendiri adalah "menggunakan fondasi" atau "memusatkan perhatian pada" suatu hal. Di sisi lain, sekolah didefinisikan sebagai institusi paling dasar dalam struktur Kementerian Pendidikan Nasional yang memiliki tanggung jawab untuk membekali peserta didik dengan "kemampuan fundamental", yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang bersifat legal dan profesional. Konsep pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan ini selaras dengan pandangan (Alim, 2024) yang mendefinisikan manajemen pendidikan bermutu sebagai suatu proses pengkoordinasian seluruh sumber daya sekolah—baik manusia, finansial, maupun material—secara efektif dan efisien guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing lembaga pendidikan. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendidikan yang terlalu sentralistik, di mana sebagian besar keputusan dan kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan spesifik sekolah di daerah (Mulyasa, 2005). Melalui penerapan MBS, sekolah memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan efisiensi, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan guna mencapai mutu pendidikan yang lebih baik.

Menurut (Hidayat, 2010), MBS merupakan model manajemen pendidikan yang mengedepankan kemandirian, partisipasi, dan akuntabilitas warga sekolah. Melalui penerapan MBS, sekolah tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyusun program, mengelola anggaran, serta mengevaluasi hasil kegiatan pendidikan secara mandiri. Kepala sekolah melibatkan semua elemen di sekolah untuk merencanakan tujuan, visi, dan misi sekolah baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga peran kepemimpinan menjadi kunci dalam menjalankan MBS (Muzayana Mahiroh & Abidin, 2023). Dengan demikian, MBS menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dan sebagai institusi yang mampu berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan sekitarnya.

Selain itu, MBS juga dipandang sebagai strategi efektif dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan. Dengan adanya otonomi di tingkat sekolah, setiap lembaga pendidikan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan, kurikulum, serta program pengembangan sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan peserta didik (Cucu & Herawan, 2017). Melalui pendekatan ini, keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan menjadi lebih besar karena mereka turut

berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sekolah. Partisipasi aktif tersebut menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Secara konseptual, MBS menempatkan sekolah sebagai pusat dari seluruh proses manajemen pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi (Depdiknas, 2001). Dengan posisi tersebut, sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan kreativitas guru, serta memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Oleh karena itu, MBS tidak hanya dimaknai sebagai sistem administrasi baru, tetapi juga sebagai paradigma pendidikan yang menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan seluruh komponen sekolah secara mandiri, partisipatif, dan akuntabel. Berdasarkan hasil kajian dari (Hasibuan, 2022) dalam Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan manajemen pendidikan yang efektif harus dilandasi oleh prinsip efisiensi, partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab publik. Prinsip-prinsip tersebut juga menjadi dasar dalam implementasi MBS di sekolah dasar.

1. Prinsip kemandirian

Kemampuan sekolah dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Kemandirian memungkinkan sekolah mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan kontekstual tanpa terlalu bergantung pada birokrasi pemerintah pusat.

2. Prinsip partisipasi

Menekankan pentingnya keterlibatan seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan. Partisipasi aktif guru, siswa, orang tua, dan masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah sehingga menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan produktif.

3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Menuntut keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan hasil kegiatan sekolah kepada publik. Transparansi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun administratif.

4. Prinsip efektivitas dan efisiensi

Setiap kegiatan dan program sekolah harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara

tepat guna. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya dilakukan secara hemat dan produktif, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Prinsip keadilan dan pemerataan

Menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun budaya. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan MBS tidak hanya dimaknai sebagai upaya desentralisasi pengelolaan pendidikan, tetapi juga sebagai strategi untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang mandiri, transparan, partisipatif, dan berkeadilan, guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di tingkat sekolah dasar merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan, di mana sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri seluruh kegiatan pendidikan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan satuan pendidikan. Implementasi MBS di sekolah dasar dilaksanakan dengan mengacu pada tiga aspek utama, yaitu pengelompokan sekolah, pentahapan implementasi, dan perangkat implementasi MBS (Aziz, 2015).

1. Pengelompokan Sekolah

Pengelompokan dilakukan untuk menyesuaikan strategi penerapan MBS dengan kemampuan manajerial sekolah. Sekolah dasar yang menerapkan MBS umumnya telah memiliki kemampuan manajerial yang baik, di mana kepala sekolah dan guru menunjukkan kompetensi yang memadai, serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dana dari komite dan orang tua siswa. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin manajerial yang mengarahkan guru dan tenaga pendidikan untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan sekolah. Selain itu, masyarakat turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah melalui dukungan moral maupun material, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis antara pihak sekolah dan lingkungan sekitar.

2. Pentahapan Implementasi MBS

Pelaksanaan MBS di sekolah dasar dilakukan melalui dua tahapan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

- a. Tahapan jangka pendek menitik beratkan pada pembentahan administrasi sekolah, peningkatan kedisiplinan guru dan siswa, serta optimalisasi kegiatan belajar mengajar.
- b. Tahapan jangka panjang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalisme guru, serta penguatan hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat. Dalam

setiap tahapannya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan demokratis, dengan melibatkan seluruh warga sekolah agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan sekolah.

3. Perangkat Implementasi MBS

Perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan MBS di sekolah dasar meliputi rencana sekolah, rencana pembiayaan, serta sistem monitoring dan evaluasi. Rencana sekolah disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Rencana pembiayaan mencakup pengelolaan dana sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber dana lainnya secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal oleh pihak sekolah maupun eksternal oleh pengawas dan masyarakat untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai wujud konkret, terdapat beberapa contoh praktik implementasi MBS di sekolah dasar (Hidayat & R., 2020), antara lain:

1. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara partisipatif antara pihak sekolah, guru, dan komite sekolah.
2. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
3. Pembuatan program pembelajaran inovatif dan kreatif, seperti penerapan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan literasi.
4. Peningkatan disiplin serta profesionalisme guru dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran.
5. Pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam kegiatan pengawasan, pengambilan keputusan, serta pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan sarana.

Tantangan dalam Implementasi MBS di Sekolah Dasar

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah dasar pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih mandiri, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada mutu. Namun, dalam praktiknya, penerapan MBS menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan ini muncul karena adanya perbedaan kemampuan manajerial antar sekolah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman seluruh pihak terhadap konsep desentralisasi pendidikan.

Menurut (Hasanah et al., 2024), tantangan utama dalam implementasi MBS di sekolah dasar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan MBS. Namun, banyak sekolah dasar masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang rusak, peralatan pembelajaran

yang minim, dan infrastruktur pendukung yang tidak memadai. Kondisi ini menghambat pelaksanaan kegiatan belajar yang efektif dan inovatif. Selain itu, masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi kendala tersendiri bagi sekolah yang ingin mengembangkan sistem manajemen modern dan berbasis digital.

2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Salah satu kendala paling nyata dalam pelaksanaan MBS adalah terbatasnya anggaran sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sering kali belum mampu mencukupi kebutuhan peningkatan mutu, terutama dalam hal pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan bahan ajar. Keterbatasan ini membuat sekolah harus mencari sumber dana tambahan dari masyarakat atau komite sekolah, yang kadang menimbulkan masalah baru apabila transparansi dan partisipasi tidak berjalan optimal.

3. Partisipasi Stakeholder yang Belum Optimal

MBS menuntut keterlibatan aktif semua pihak guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, partisipasi stakeholder masih cenderung formalitas. Banyak keputusan penting masih didominasi oleh kepala sekolah tanpa melibatkan masyarakat secara substansial. Di sisi lain, sebagian orang tua kurang memiliki kesadaran atau waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan sekolah.

4. Kurangnya Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

MBS memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai tujuan. Namun, banyak sekolah belum memiliki instrumen evaluasi internal yang terstruktur. Evaluasi sering dilakukan hanya sebagai formalitas administrasi, bukan sebagai alat refleksi dan perbaikan mutu. Akibatnya, pelaksanaan program sekolah tidak terpantau secara sistematis, dan tindak lanjut hasil evaluasi kurang maksimal.

Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi MBS di Sekolah Dasar

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah dasar merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada mutu. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam memahami konsep MBS secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar pelaksanaan MBS dapat berjalan efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Menurut (Dian Novika Dewi, Titik Haryati, 2025), ada beberapa strategi yang dapat mengatasi tantangan utama dalam pelaksanaan MBS dan menciptakan manajemen mutu Pendidikan diantaranya:

1. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Strategi utama yang direkomendasikan adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru serta tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah penguasaan teknologi informasi dan kemampuan mengintegrasikannya dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Pelatihan intensif membantu guru beradaptasi dengan tuntutan era digital dan meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis proyek.

2. Optimalisasi Kolaborasi dengan Pihak Eksternal (DUDI dan Masyarakat)

Sekolah didorong untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta masyarakat sekitar. Kolaborasi ini bertujuan memberikan dukungan sumber daya, memperluas kesempatan magang atau praktik kerja bagi siswa, serta meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Di konteks sekolah dasar, strategi ini dapat disesuaikan dengan menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, LSM, atau lembaga pendidikan lainnya.

3. Pemberdayaan Komite Sekolah dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Komite sekolah memiliki peran penting sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah memberdayakan komite sekolah agar berfungsi optimal sebagai partner strategis dalam perencanaan, pengawasan, dan pendanaan sekolah. Sekolah juga disarankan memperkuat komunikasi dengan orang tua melalui rapat, forum diskusi, dan kegiatan sosial agar partisipasi masyarakat lebih substansial, bukan sekadar formalitas.

4. Evaluasi Berkelanjutan dan Transparansi Pengelolaan Sekolah

Implementasi MBS menuntut evaluasi yang sistematis dan transparan. Sekolah disarankan untuk mengembangkan sistem evaluasi berbasis data dan laporan akuntabilitas publik yang dapat diakses oleh guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, efektivitas manajemen, dan tingkat kepuasan warga sekolah.

5. Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi Internal

Rendahnya pemahaman guru dan masyarakat tentang MBS dapat diatasi dengan memperkuat sosialisasi visi, misi, dan program sekolah secara rutin. Kepala sekolah berperan penting dalam membangun budaya komunikasi terbuka dan motivasi kerja yang tinggi di antara seluruh warga sekolah, sehingga setiap program MBS dipahami dan dijalankan dengan semangat kolaboratif.

Kesimpulan dan Saran

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah dasar merupakan upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Penerapan MBS menekankan pentingnya prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil kajian, penerapan MBS di sekolah dasar telah menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja sekolah, profesionalisme guru, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya kompetensi manajerial kepala sekolah dan guru, serta lemahnya sistem evaluasi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga eksternal, transparansi dalam pengelolaan dana, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, MBS dapat diimplementasikan secara optimal untuk menciptakan sekolah yang mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Saran

Untuk memastikan implementasi MBS berjalan efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat dukungan kebijakan serta pendanaan agar sekolah memiliki kapasitas yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS. Selain itu, kepala sekolah dan guru hendaknya terus mengembangkan kompetensi profesional dan manajerial melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran berbasis praktik baik, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi. Langkah-langkah ini sangat krusial untuk mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dihadapi sekolah dasar.

Di sisi sekolah, masyarakat dan komite sekolah diharapkan berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi program pendidikan, mengubah partisipasi formalitas menjadi substansial. Lebih lanjut, sekolah perlu membangun budaya transparansi dan komunikasi terbuka agar seluruh warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang sama dalam memajukan mutu pendidikan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat dasar akan mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

Alim, S. (2024). Dasar-dasar manajemen pendidikan bermutu. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/20892/>

Aziz, A. Z. (2015). Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *El-Tarbawi*, 8(1), 69–92. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5>

Cucu, C., & Herawan, E. (2017). Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1), 40–48. <https://doi.org/10.17509/jap.v23i1.5572>

Depdiknas. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional.

Dian Novika Dewi, Titik Haryati, E. W. (2025). Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Tantangan dan Strategi di SMK Negeri 1 Jepang. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(20), 494-499.

Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3162-3169. <https://repository.uin-malang.ac.id/18994/>

Hasibuan, S. M. (2022). Dasar Penerapan Serta Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 27-35. <https://doi.org/10.61456/tjiec.v2i2.21>

Hidayat, A. (2010). Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah. *Bandung Pustaka Educa*, 36.

Hidayat, & R. (2020). Manajemen Berbasis Sekolah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1), 45-60.

Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Reamaja Rodaskarya.

Muzayana Mahiroh, I., & Abidin, M. (2023). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 3230-3247. <https://repository.uin-malang.ac.id/15722/>

Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *EduTech*, 2(1), 86-96.

Wijoyo, H. (2021). Total Quality Management Dalam Pendidikan. *SSRN Electronic Journal*, October 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3937098>